

**Redaksi**

Penanggung Jawab:  
Dody Budi Waluyo  
Pemimpin Redaksi:  
Difi A. Johansyah  
Redaksi Pelaksana:  
Harymurthy Gunawan,  
Rizana Noor, Tutut Dewanto,  
Dedy Irianto, Diah Woelandari,  
Wahyu Indra Sukma,  
Risanthy Uli N

**Alamat Redaksi**

Humas Bank Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin 2 - Jakarta  
Telp. : 021 - 3817317,  
3817187  
email : humasbi@bi.go.id,  
website : www.bi.go.id

Foto: "Saling Bantu"  
oleh: Lauw Nam le



# gerai info

Edisi 31 | Oktober 2012 | Tahun 3 | Newsletter Bank Indonesia

## MEJA REDAKSI

Pembaca yang budiman, *Gerai Info* pada edisi kali ini mengangkat topik tentang Investor Relations Unit (IRU). Tentu, Anda akan bertanya, apa itu IRU? IRU adalah *dedicated team* yang terdiri Kemenko Perencanaan, Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan instansi lainnya dengan tugas mengelola *sovereign rating* dan *country risk classification* Indonesia. IRU dibentuk sebagai *single point of contact* bagi investor, kreditor, dan lembaga pemeringkat dunia seperti S&P, Moody's dan Fitch yang ingin mengetahui perkembangan terkini perekonomian Indonesia. Kehadiran IRU yang secara formal mulai terbentuk pada 2007 ini diharapkan akan membangun persepsi yang positif terhadap prospek perekonomian Indonesia. Upaya yang dilakukan mulai dari menerbitkan *Recent Economic Development* yang dirilis sebulan sekali, menggelar *teleconference* tiga bulan sekali hingga merespons berbagai pertanyaan terkait perekonomian nasional. Kerja keras IRU sudah membuahkan hasil ketika lembaga pemeringkat dunia Moody's dan Fitch menempatkan Indonesia dalam kelompok negara-negara *Investment Grade*. ●

Salam,  
Difi A. Johansyah  
Kepala Grup Humas  
Bank Indonesia

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.

## Investor Relations Unit (IRU) :

# Yang Bikin Kinclong Wajah Perekonomian

Indonesia adalah 'sorga' bagi investor dan kreditor asing untuk berinvestasi. Situasi ini persis seperti Indonesia sebelum krisis 1997/1998 ketika menyandang julukan *The New Asian Tiger*. Hal itu bisa terjadi setelah Indonesia mendapat predikat *Investment Grade (IG)* pada 2011 dan 2012. IG adalah opini lembaga pemeringkat yang merefleksikan kemampuan suatu negara dalam menjaga stabilitas dan prediktibilitas perekonomian. Sejak saat itu, boleh dibilang investor dan kreditor semakin melirik Indonesia.

Bukan perkara enteng untuk sampai mendapat predikat IG. Jalannya panjang dan berliku. Sebelum krisis ekonomi 1997/1998, Indonesia menikmati laju pertumbuhan ekonomi tinggi dan sempat menyandang predikat IG. Sebagai negara yang terus maju, Indonesia dinilai tidak pantas lagi mendapat pinjaman lunak dari lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Sejak itulah Pemerintah mesti mencari sumber lain di pasar uang komersial. Pada 1996, Indonesia menerbitkan Yankee Bond. Ada kewajiban, setiap penerbit obligasi harus diperingkat lembaga pemeringkat dunia seperti S&P, Moody's dan Fitch. Manfaat pemeringkatan bagi negara penerbit adalah untuk menentukan tingkat kupon obligasi yang diterbitkan, sedangkan bagi investor/kreditor untuk mengetahui *creditworthiness* penerbit.

Sekitar setahun kemudian, Indonesia dihajar krisis. Akibat krisis ini, Indonesia kehilangan predikat IG. Apalagi ketika Pemerintah mengajukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) utang melalui forum Paris Club pada 1999, S&P menurunkan peringkat utang luar negeri Indonesia menjadi *Selective Default (SD)*. Predikat ini sama artinya kondisi suatu negara yang nyaris bangkrut dan dijauhi investor. Untunglah, setelah Bank Indonesia (BI) menjelaskan maksud penjadwalan utang tadi, S&P memperbaiki penilaiannya.

Pada 2000, S&P kembali merilis opini SD atas utang Indonesia. Alasannya, ada bagian dalam *term and condition* penjadwalan utang yang dinilai kurang menguntungkan kreditor. Sekali lagi, BI mengklarifikasi atas penilaian S&P melalui kantor berita *Reuters* sehingga S&P merevisi opininya. Kejadian demi kejadian dimana BI harus berhadapan dengan lembaga pemeringkat, menyadarkan adanya kebutuhan riil untuk membangun *single point of contact* bagi lembaga pemeringkat, investor dan kreditor. Dari sinilah mengalir gagasan untuk membentuk Investor Relations Unit (IRU).

Kehadiran IRU dipandang krusial mengingat fungsi penting yang dimainkan, yakni sebagai komunikator (*speaking*

*function*) yang mengkomunikasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia kepada lembaga pemeringkat, investor, dan kreditor agar terbangun persepsi yang semakin positif. Sebagai penyerap informasi (*listening function*), IRU menyerap informasi dari lapangan seperti masukan lembaga pemeringkat, investor, dan kreditor. Eksistensi IRU semakin solid dengan terbentuknya *dedicated team* hasil kesepakatan antara Kantor Menko Perekonomian, BI dan Kementerian Keuangan pada 2007.

IRU mengemban tugas mengelola *sovereign rating* dan *country risk classification* Indonesia. Untuk itulah diperlukan strategi komunikasi yang jitu guna membangun persepsi positif terhadap prospek perekonomian nasional, dan meningkatkan kesadaran domestik akan arti penting *sovereign rating*. Beragam upaya dilakukan. Misalnya, dengan membangun website yang *user friendly* dimana beragam informasi terkini perekonomian Indonesia dapat diakses. Telekonferensi antara pejabat tinggi Indonesia dengan investor/kreditor dilakukan tiga bulan sekali. Selain itu, IRU menerbitkan publikasi bulanan *Recent Economic Development* yang berisi perkembangan perekonomian Indonesia terkini.

Kesungguhan kerja IRU mendapat apresiasi Institute of International Finance (IIF). Lembaga ini memantau secara rutin kegiatan IRU di berbagai negara. Pada publikasi IIF 2011 dan 2012, kegiatan IRU Indonesia mendapat nilai tertinggi dengan skor 38 (ranking 1 dari 38 negara). Selain itu, kegiatan diseminasi data menduduki ranking ketiga terbaik dari 38 negara. Kerja keras Pemerintah dan BI serta pemangku kepentingan dalam memperbaiki kinerja perekonomian dan upaya yang dilakukan IRU, pun membuahkan hasil positif dengan predikat IG dari Fitch pada 15 Desember 2011 dan Moody's pada 18 Januari 2012.

Besar manfaat punya predikat IG. Bagi Pemerintah selaku penerbit obligasi, tingkat kupon yang dibayar semakin rendah dan biaya promosi murah. Sedangkan bagi perekonomian secara umum, risiko berinvestasi rendah, investasi meningkat, penerimaan pajak ikut naik, lapangan kerja bertambah, kesejahteraan membaik, dan ketahanan perekonomian pun yang kian kokoh.

Jadi, Indonesia sebagai 'sorga' bagi investor dengan predikat IG perlu dipertahankan dan digenjot lebih baik lagi. Ini mempertegas kembali perlunya kerja keras semua pihak. Nah, setelah itu bola ada ditangan IRU, bagaimana memoles agar citra perekonomian Indonesia semakin *kinclong* di mata lembaga pemeringkat, investor dan kreditor. ●

# Strategi Komunikasi Jitu, Kunci Keberhasilan IRU

*“The idea of full disclosure is just about as dangerous as no disclosure at all. As with most things, we have to find the proper balance”*

Investor Relations Unit (IRU) mengemban tugas utama memformulasikan strategi untuk meningkatkan *sovereign rating* Indonesia. Untuk maksud itu, IRU menyiapkan beragam upaya. Misalnya, mempublikasi *Indonesia Recent Economic Development (RED)* setiap bulan. Informasi RED tersedia di website IRU yang bisa diakses melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). RED memaparkan gambaran terkini ekonomi makro, moneter, fiskal dan pengelolaan utang pemerintah. Bahkan, bila investor atau kreditor ingin bertanya terkait RED, tersedia *contact person* yang bisa dihubungi.

Selain itu, IRU juga punya kegiatan triwulanan berupa telekonferensi antara pejabat tinggi BI atau Kementerian Keuangan yang memaparkan perkembangan terkini kondisi perekonomian nasional. Percakapan jarak jauh ini termasuk kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh investor dan kreditor. Melalui telekonferensi ini, antara nara sumber IRU dan audiens bisa saling bertanya-jawab secara langsung. Selain itu, kegiatan keseharian IRU juga banyak memberikan respons terhadap beragam pertanyaan yang disampaikan lembaga pemeringkat, investor dan kreditor.

IRU menerima kunjungan lembaga pemeringkat seperti Standard & Poors, Fitch dan Moody's. Mereka ke Jakarta dalam rangka melakukan asesmen terhadap *sovereign rating Indonesia*. Masing-

masing lembaga pemeringkat punya perhatian berbeda terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya, ada yang menaruh perhatian terhadap kondisi infrastruktur Indonesia yang rendah. Untuk merespons perhatian itu, IRU berupaya mengklarifikasinya dengan menyodorkan sejumlah data perkembangan terkini terkait perbaikan kualitas infrastruktur di dalam negeri, termasuk mengajak utusan lembaga pemeringkat tadi melakukan kunjungan lapangan.

Beragam kegiatan IRU tadi diharapkan bisa membangun persepsi positif lembaga pemeringkat, investor dan kreditor yang ujung-ujungnya akan mendongkrak *sovereign rating* Indonesia serta meningkatnya arus investasi. Nah, disinilah krusialnya IRU memiliki strategi komunikasi yang jitu kepada *stakeholders*nya. ●

## Indonesia Terbuka



Difi A. Johansyah,  
Kepala Grup Humas BI

Membaca judul diatas mengingatkan kita akan jaman jaya kita di bulutangkis dimana kita merajai yang namanya Indonesia Terbuka dan turnamen bulutangkis terbuka dimanapun. Namun, ini bukan mengenai bulutangkis. Istilah terbuka disini lebih mirip istilah perusahaan terbuka atau Tbk yang biasa dikenal di pasar modal.

Disebut terbuka, karena perusahaan Tbk memungkinkan setiap orang menjadi pemegang saham, siapapun asal sanggup beli. Ciri khas perusahaan Tbk ini bisa dilihat dari websitenya yang biasanya selalu memuat “Investor Relations” sebagai salah satu fungsi dari websitenya. Isinya adalah informasi yang diperlukan bagi setiap investor (pemegang saham) tentang perusahaan Tbk tersebut.

Oleh karena itu fungsi “Investor Relations” ini sangat penting bagi setiap entitas yang bersifat

terbuka karena merupakan jendela komunikasi antara pemegang saham dengan perusahaan yang saham dimilikinya. Fungsi ini tidak hanya pada perusahaan tetapi juga bahkan pada negara seperti Indonesia.

Kenapa Indonesia juga memiliki fungsi Investor Relations? Pada prinsipnya sama dengan Perusahaan Tbk karena Indonesia menawarkan kesempatan mendapatkan keuntungan tidak hanya bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi pihak asing, apakah itu perorangan, perusahaan dan juga lembaga keuangan. Keuntungan bagi Indonesia adalah dengan keikutsertaan mereka, maka Indonesia bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana halnya negara berkembang, Indonesia mengalami kesenjangan tabungan dan investasi dimana kebutuhan dana

untuk investasi selalu melebihi kemampuan dana sendiri sehingga membutuhkan dana dari luar negeri. Potensi untuk itu ada melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan.

Oleh karena itu, fungsi investor relations unit merupakan keharusan untuk digarap dengan baik. Syaratnya sederhana, kita harus PeDe! Tidak cukup hanya mengandalkan tulisan The Economist yang bilang ekonomi RI paling stabil di dunia dan penilaian Financial Times yang mengatakan ekonomi RI paling baik nomor empat di dunia! Lebih dari itu, penilaian pihak luar ini harus dikemas dan *dikomunikasikan* dengan baik. Malaysia saja yang hanya sebagian kecil dari Asia berani mengatakan The Truly Asia, kita, Indonesia bisa lebih dari itu apabila kita daya gunakan Investor Relations kita dengan profesional. ●

# IRU : Jembatan Komunikasi Dengan Investor & Lembaga Pemeringkat



**Firman Darwis,**  
 Analis Ekonomi  
 Divisi Analisis Pinjaman Luar Negeri  
 & Hubungan Investor  
 Departemen Internasional

Ketika Indonesia memasuki kelompok negara berpendapatan menengah, maka pupus sudah hak untuk memperoleh pinjaman lunak (*soft loan*) dari lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan, diperlukan sumber dana alternatif seperti dari pasar uang komersial. Konsekuensi mengais dana di pasar komersial diperlukan prasyarat yang lebih ketat. Misalnya, surat utang yang diterbitkan pemerintah harus mendapat peringkat dari lembaga pemeringkat internasional sebagaimana ketika Indonesia menerbitkan Yankee Bond pada 1996 yang tentunya telah diperingkat Standard and Poor's (S&P) dan Moody's Rating.

**“Dengan perkembangan kebutuhan data dan informasi stakeholder IRU yang semakin bervariasi dan terdiferensiasi, tidak menutup kemungkinan dibutuhkannya peran serta institusi-insitusi terkait lainnya.”**

Tak lama setelah penerbitan Yankee Bond tersebut, badai krisis ekonomi melanda Asia dan mencapai puncaknya pada tahun 1997/1998. Krisis yang bermula dari Thailand menghampiri Indonesia tanpa terbendung. Kondisi tersebut diperparah dengan rumor yang beredar terkait kondisi yang terjadi di Indonesia, namun tidak terdapat saluran komunikasi resmi yang dapat dijadikan tempat untuk mengkonfirmasi. Sentimen negatif beredar, investor pasar keuangan kalang kabut, nilai rupiah terpuruk, dan situasi pun kian memburuk. Kepercayaan investor lenyap terhadap pasar keuangan Indonesia.

Sejatinya, mengendalikan sentimen negatif di pasar keuangan bukanlah perkara mudah. Namun *issue* yang lebih mendasar pada waktu itu yakni kebutuhan memiliki *single point of contact* (SPC) bagi data dan informasi Indonesia yang secara resmi dimiliki oleh otoritas

perekonomian. Investor sangat membutuhkan sumber yang mampu menyediakan data dan informasi yang dapat diandalkan, transparan, kredibel dan disajikan secara berkala. Seandainya, kita sudah punya SPC pada waktu krisis, mungkin akhir ceritanya agak berbeda. Keberadaan SPC akan membangun hubungan timbal balik antara investor dan otoritas perekonomian yang akan meningkatkan transparansi dan kualitas proses perumusan hingga kebijakan yang dihasilkan.

Belajar dari pengalaman tersebut, Bank Indonesia (BI) memandang perlu memiliki SPC guna membangun komunikasi dua arah yang intensif dan lebih

maka BI berinisiatif membentuk *Investor Relations Unit* (IRU) pada tahun 2005. Dengan dukungan pemerintah IRU yang didirikan bukanlah IRU untuk kepentingan BI saja, namun disepakati menjadi IRU Republik Indonesia. Pembentukan IRU ini dibantu juga oleh *Institute of Internasional Finance* (IIF) agar perkembangannya sesuai dengan *international best practices*.

Dua tahun kemudian, Februari 2007, fungsi IRU diperkokoh oleh MoU mengenai Upaya Peningkatan *Sovereign Rating* dan *Country Risk Classification* Indonesia oleh BI, Kemenko Perekonomian dan Kemenkeu, sebagai bentuk dukungan formal bagi IRU RI.

Sekretariat bersama IRU yang berada di BI bertugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka berhubungan dengan lembaga pemeringkat dan investor.

Di bawah koordinasi BI, IRU kemudian bekerja dengan dukungan *dedicated team* terdiri dari BI dan Instansi Pemerintah. Selain tiga lembaga yang terikat dalam MoU, IRU tumbuh semakin besar dengan bergabungnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan dan Kemeneg

ESDM dalam *dedicated team* IRU RI. Dengan perkembangan kebutuhan data dan informasi *stakeholder* IRU yang semakin bervariasi dan terdiferensiasi, tidak menutup kemungkinan dibutuhkannya peran serta institusi-insitusi terkait lainnya. Dengan demikian, ke depan eksistensi IRU akan semakin bertumbuh sejalan dengan peningkatan tuntutan membangun strategi komunikasi dengan lembaga pemeringkat dan investor. ●



luas tidak hanya dengan lembaga pemeringkat namun juga kepada pelaku pasar keuangan internasional. Selanjutnya, sejak 2002 BI membuat *website Investor Information and Enquiries* (IIE) yang menyediakan data dan informasi mengenai perkembangan kondisi ekonomi, keuangan, perbankan, kebijakan pemerintah dan isu-isu terkini yang strategis kepada investor. Ketika *website* IIE menjadi kebutuhan yang semakin besar,

# Penguatan Peran IRU

## (Ditengah Kritik Terhadap Lembaga Pemeringkat)



**Firman Darwis,**  
 Analis Ekonomi  
 Divisi Analisis Pinjaman Luar Negeri  
 & Hubungan Investor  
 Departemen Internasional

Pertemuan *rating analyst* dari lembaga pemeringkat dengan pejabat lingkungan pemerintahan dalam proses asesmen *sovereign credit rating* Indonesia yang sebenarnya memasuki sesi penutup, sontak kembali hangat. Palsanya, muncul pertanyaan tidak terduga. Pertanyaan tersebut terkait dengan peranan lembaga rating dalam krisis utang negara-negara Eropa. Pejabat tersebut menyoroti ketidakmampuan lembaga rating memberi peringatan dini terhadap risiko munculnya krisis utang. Muncul komentar sinis dan keraguan atas kehandalan hasil penilaian oleh lembaga pemeringkat.

Sebagaimana diketahui bahwa peringkat kredit suatu negara (*sovereign credit rating*) didefinisikan sebagai indikator yang merefleksikan kemampuan dan kemauan suatu negara untuk membayar kewajiban pinjaman luar negerinya sesuai dengan persyaratan yang disepakati (Butler & Fauver, 2006). Penilaian lembaga-lembaga pemeringkat bersifat *forward looking*, yang menggambarkan kemampuan dalam jangka menengah-panjang. Penilaian ini didasarkan pada berbagai aspek kinerja keuangan pemerintah, kondisi dan prospek ekonomi makro serta aspek politik dan hukum suatu negara.

Pada pasar keuangan global, terdapat tiga lembaga yang disebut sebagai lembaga pemeringkat utama. Penilaian rating dari lembaga tersebut menjadi rujukan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Tiga lembaga tersebut adalah Standard and Poors (S&P), Moody's Investor Service

dan Fitch Ratings. Selain itu, ada dua lembaga pemeringkat Jepang yaitu Japan Credit Rating Agency (JCRA) dan Rating and Investment Information Corporation (R&I), yang melakukan pemeringkatan untuk kepentingan investor Jepang.

Secara empiris telah dibuktikan bahwa peningkatan *sovereign credit rating* memberikan pengaruh kepada penurunan biaya pinjaman (*cost of borrowing*). Dampaknya semakin signifikan lagi bagi negara yang memperoleh lompatan peringkat dari posisi *non investment grade* menjadi *investment grade*. Lompatan peringkat ini memberikan efek perbaikan ekspektasi pasar dan mendorong peningkatan arus masuk investasi dari *investor base* yang lebih luas dengan karakteristik yang lebih berjangka panjang (Jaramillo, 2011). Namun demikian, indikator ekonomi makro seperti inflasi, neraca pembayaran, rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan riil PDB, serta jumlah cadangan devisa, juga ikut berperan dalam membentuk sentimen pasar.

Dalam kasus Indonesia, kenyataan yang terjadi indikator di pasar keuangan justru bergerak mendahului hasil peringkat lembaga pemeringkat. Meskipun Indonesia memperoleh predikat *investment grade* pada akhir 2011 (Desember 2011 oleh Fitch) dan awal tahun 2012 (Januari 2012 oleh Moody's), namun pada akhir tahun 2010 obligasi Indonesia telah diperdagangkan pada level rentang imbal hasil (*yield*) obligasi negara-negara yang telah memperoleh predikat *investment grade*. Hal ini menunjukkan bahwa investor memiliki keyakinan berdasarkan asesmen mereka terhadap kinerja perekonomian Indonesia saat ini dan prospeknya ke depan. Investor tidak sepenuhnya mendasarkan keputusan investasinya merujuk hasil penilaian lembaga pemeringkat.

Sedikit menggali sejarah munculnya kebutuhan atas lembaga pemeringkat, yang pada era 1980-an kesenjangan sumber daya yang dimiliki investor besar dan kecil masih sangat lebar. Investor besar sudah sangat maju dalam menghasilkan analisis pasar keuangan melalui divisi riset yang canggih. Tidak demikian dengan investor kecil dengan sumber daya yang relatif kecil, untuk menghasilkan riset pasar sendiri dibutuhkan biaya yang relatif besar. Peluang kebutuhan

hasil analisis pasar inilah yang dimanfaatkan lembaga pemeringkat dengan bertindak sebagai peneliti pasar dan penyedia analisa risiko bagi investor pasar keuangan. Peluang tersebut juga didukung kondisi masih terbatasnya ketersediaan data, arus informasi dan jalur komunikasi dengan negara penerbit surat utang, sehingga investor belum memiliki akses terhadap data dan informasi sebagaimana layaknya saat ini.

Belajar dari pengalaman krisis Asia pada 1997/1998 yang membuka mata akan pentingnya saluran komunikasi dengan investor. Untuk itu, beberapa negara-negara penerbit surat utang seperti Brasil, Korea Selatan, Turki, dan Indonesia, pada awal 2000-an mulai secara formal membentuk *Investor Relation* (IR) yang bertindak sebagai *single point of contact* atas data dan informasi ekonomi. Dalam perkembangannya *investor relations* tersebut semakin diakui sebagai sumber data dan informasi ekonomi yang handal, transparan, kredibel dan tepat waktu. Berbagai produk IR seperti *website*, informasi terkait kondisi ekonomi makro terkini, dan forum pertemuan investor yang sudah memenuhi kebutuhan investor besar dan kecil. Mereka tidak lagi terlalu tergantung pada hasil penilaian lembaga pemeringkat. Dengan dukungan teknologi, investor sekarang memiliki akses langsung terhadap data dan informasi ekonomi terkini setiap negara melalui IR-nya.

Di sisi lain, investor juga terus melakukan peningkatan sumber daya yang memungkinkan untuk menghasilkan riset pasar dan analisa risiko dengan biaya yang semakin minim. Perkembangan kekuatan sumber daya investor tersebut berjalan seiring dengan pelaksanaan tugas IR yang semakin solid, menyebabkan lembaga pemeringkat bukan lagi merupakan satu-satunya sumber pertimbangan pengambilan keputusan investasi.

Strategisnya peran IR negara-negara penerbit surat utang tentu saja bukan suatu 'kemewahan', namun merupakan tantangan sebagai mitra lembaga pemeringkat sekaligus *single point of contact* yang handal bagi investor dan pemangku kepentingan yang semakin luas. Nah, *diminishing in utility of rating agency* memang bukanlah terminologi yang tepat, namun pada kenyataannya IR memainkan peran yang semakin penting.●

# Prestasi IRU Indonesia: Wow Gitu ...!



**Andy Setyo Biwado,**  
Analisis Ekonomi  
Divisi Analisis Pinjaman Luar Negeri &  
Hubungan Investor  
Departemen Internasional

Investor Relations Unit (IRU) Republik Indonesia (RI) memperlihatkan perbaikan dari waktu ke waktu, salah satunya dengan adanya sokongan dari instansi lain yang membuat peran IRU semakin kuat. IRU berkeinginan data dan informasi yang disajikan makin diperhatikan dan menjadi rujukan penting bagi investor, analis, akademisi dan pihak berkepentingan lainnya.

Menyadari posisi pentingnya IRU terus memperbaiki diri, agar sesuai dengan *best practices*. Perbaikan IRU merujuk pada kriteria yang ditetapkan Institute of International Finance (IIF). Rujukan kepada IIF tentu ada alasannya. IIF merupakan lembaga penting yang beranggotakan lebih dari 450 anggota yang berasal dari seluruh pelaku pasar finansial dari lebih 70 negara. Lembaga yang bermarkas di Washington DC tersebut antara lain terdiri dari perwakilan lembaga internasional, bank sentral, kementerian keuangan, bank, perusahaan asuransi, dan *wealth management*. Lembaga yang berdiri tahun 1983 ini lahir sebagai *response* atas krisis utang internasional yang pernah terjadi sebelumnya.

Para anggota IIF rutin berdiskusi untuk merumuskan prinsip-prinsip dalam menghadapi perubahan dinamis pasar keuangan. Prinsip tersebut dirumuskan dengan pendekatan sukarela antara debitur dan kreditur. Tujuannya, agar tercipta stabilitas aliran modal ke *emerging markets* dan negara debitur lainnya melalui prinsip transparansi, dialog, negosiasi berdasar

itikad baik (*good faith*) dan perlakuan adil kreditur. Melalui diskusi dan konsultasi anggota IIF dengan sektor swasta, IIF telah mengembangkan 20 kriteria untuk kegiatan *investor relations*, dan 23 kriteria untuk praktek diseminasi data oleh negara penerbit surat utang. Dalam setahun sekali IIF menerbitkan laporan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut di berbagai negara, sebagai pedoman setiap negara menuju *best practices*.

## Terobosan Penting IRU

Atas dasar kriteria itulah, IRU terus berbenah. Kuncinya adalah aktif berkomunikasi dan menyediakan data kredibel dan terkini. Beberapa terobosan penting telah dilakukan IRU, misalnya, kegiatan *investor conference call* yang dilaksanakan secara triwulanan sejak akhir 2009. Investor dan analis pun menyambut antusias forum ini. Sekarang, mereka memiliki sarana untuk berinteraksi langsung dengan pejabat tinggi baik dari Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan. Isu-isu terkini dari sisi moneter, fiskal dan utang terkonfirmasi melalui forum ini. Bagi yang tidak dapat bergabung saat acara berlangsung, IRU menyediakan *playback* yang dapat diakses setiap saat melalui *website*. Tingkat partisipasi pun terus meningkat baik kuantitas maupun kualitas.

Selain itu, untuk menginformasikan perkembangan perekonomian terkini, IRU telah menyusun presentasi yang lebih dikenal dengan *Indonesia Recent Economic Development* (RED). Dengan mengakses RED ini, pengguna dengan mudah memperoleh gambaran besar perekonomian Indonesia. Informasi ekonomi makro, moneter, fiskal dan pengelolaan utang pemerintah tersaji lengkap dalam RED. Pengguna tidak perlu khawatir ketinggalan informasi karena produk ini dimutakhirkan secara bulanan. Jika perlu konfirmasi, tersedia *contact person* yang dapat dihubungi baik melalui telepon maupun email.

Menyadari *website* merupakan jalur komunikasi yang efektif, IRU memberikan perhatian besar pada media ini dan terus melakukan pengembangan. Dari sisi tampilan, *website* dibuat semenarik mungkin dan lebih *user-friendly*. Dari sisi konten, data-data yang banyak dibutuhkan investor atau analis terus dilengkapi. Agar lebih *user-*

*friendly* hampir semua data disajikan dalam format excel sehingga mudah diolah sesuai kebutuhan. Pengkinian data dilakukan secara tepat waktu dan berkala.

*Website* IRU dilengkapi pula dengan alamat kontak sebagai jembatan komunikasi. Pengguna dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur ini. Pengguna juga dapat mendaftar dalam *distribution list* IRU. Selanjutnya, pengguna akan mendapatkan notifikasi setiap kali terdapat informasi baru yang dipublikasikan. Rilis Rapat Dewan Gubernur, pengumuman Neraca Pembayaran Indonesia sampai undangan mengikuti *investor conference call* dapat diperoleh melalui fitur ini.

## Penilaian terhadap IRU

Kerja keras IRU membuahkan hasil. Pengakuan atas kinerja IRU Republik Indonesia datang langsung dari IIF. Indonesia telah mencapai skor tertinggi untuk kegiatan *investor relations* sejak 2011, setara dengan Brasil dan Turki. Untuk kegiatan diseminasi data, Indonesia berada di *second layer* bersama Brasil, Republik Dominika, Afrika Selatan dan Uruguay. Posisi Indonesia masih berada dibawah Turki dan Chili.

Menurut lembaga yang sering mengadakan pertemuan berbarengan dengan sidang World Bank / IMF ini, adanya transparansi dan *investor relations* yang kuat terbukti memberikan andil bagi negara dalam menghadapi krisis keuangan global tahun 2007-2009. Negara dengan kinerja kebijakan kuat dan kegiatan komunikasi aktif mampu melewati goncangan krisis dengan baik. Indonesia, Polandia dan Turki termasuk negara yang dikategorikan memiliki kebijakan pengelolaan utang yang kuat, sehingga menikmati hasilnya dalam bentuk rekor imbal hasil obligasi yang rendah.

Meskipun IRU telah menunjukkan prestasi mengesankan akhir-akhir ini, kinerja IRU tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Keterlibatan instansi pendukung lain juga makin diperlukan. Selama ini, IRU telah memiliki pertemuan *dedicated team* sebagai sarana untuk menguatkan koordinasi antar instansi. Forum ini perlu lebih dikuatkan agar melahirkan hasil strategis untuk peningkatan kinerja IRU ke depan. ●

# Ubi Cilembu & Kinerja Perekonomian



**Dedy Irianto,**  
 Analis  
 Divisi Relasi Internal & Publikasi  
 Departemen Perencanaan Strategis dan  
 Hubungan Masyarakat

Genting Highland merupakan salah satu objek kunjungan wisata di Malaysia. Negeri ini sangatlah getol menggunakan jargon “Malaysia Truly Asia”. Jargon yang menggambarkan bahwa kemajemukan masyarakat dan budaya ada pada negeri ini. Keinginan positif demi kemajuan bangsa dan negara Malaysia. Pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat Malaysia secara keseluruhan. Contoh yang baik bagi tata kelola demi kepentingan masyarakat suatu negeri.

Di sejumlah sudut Genting Highlands akan dengan mudah mendapati *counter* yang menjual “Sweet Potatoes”. Tulisan “Sweet Potatoes” cukup mencolok dan menarik bagi pengunjung. Apakah itu? Bukan makna dari “Sweet Potatoes” atau dikenal juga dengan ubi jalar yang membuat penulis takjub. Tetapi tumpukan kardus yang berisikan ubi jalar dan tertera “Ubi Cilembu Madu” dengan salah satu sisinya tertulis Made In Indonesia.

Kebanggaan yang tentunya semu kalau hanya ubi Cilembu saja yang menjadi produk ekspor Indonesia, tetapi akan membanggakan kalau masih banyak ‘ubi Cilembu’ lainnya yang dapat kita ekspor. Apalagi sudah memiliki nilai ekspor yang terbaik dengan telah diprosesnya hasil bumi Indonesia menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Hal inilah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh segenap anak negeri ini.

Memang ada kekhawatiran sementara pihak di negara tercinta ini ketika menengok kinerja perekonomian nasional yang termonitor dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada Triwulan II 2012. Pada periode itu terjadi penurunan cukup besar dari nilai ekspor yang disertai masih cukup tingginya nilai impor, walaupun

secara nominal terjadi penurunan nilai impor nasional.

Kurang baiknya realisasi maupun *outlook* NPI pada Triwulan II itu lebih disebabkan oleh defisit transaksi berjalan yang membesar. Hal ini diakibatkan oleh kondisi krisis yang dialami oleh banyak negara Eropa. Membaiknya kondisi Eropa diharapkan dapat meningkatkan permintaan atas produk-produk Indonesia baik berupa barang jadi maupun setengah jadi dari hasil bumi di dalam negeri.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk mendapat perhatian yang besar dari seluruh aktor perekonomian di dalam negeri, yakni apa yang dituturkan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution. “Kita perlu melakukan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi agar penyesuaian defisit transaksi berjalan mengarah pada tingkat yang *sustainable* sehingga keberlangsungan ekonomi dapat terjaga,” tandas GBI.



Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) akan mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat penyesuaian keseimbangan eksternal melalui kebijakan nilai tukar, penguatan operasi moneter, kebijakan makroprudensial dalam rangka mengelola permintaan domestik, serta kebijakan yang mendorong arus modal. Di sisi Pemerintah, berbagai kebijakan akan ditempuh agar kegiatan ekspor dapat terus ditingkatkan dan impor dikelola untuk mendukung kesehatan Neraca Pembayaran. Bukankah, muara dari upaya-upaya tersebut adalah semakin membaiknya wajah dan kinerja perekonomian nasional.

BI tidak hanya berhenti di sini saja dalam menyikapi keadaan perekonomian nasional, khususnya terkait dengan dampak krisis di

Eropa yang dampaknya terhadap NPI dan prospek perekonomian nasional. Berbagai forum pertemuan digelar guna memberi gambaran utuh tentang kondisi ini juga dilakukan dalam berbagai kesempatan. Misalnya, membuka dialog dengan kalangan media, pengamat perekonomian dan perbankan nasional, dunia usaha serta kalangan parlemen, terus dilaksanakan secara formal maupun informal. Bahkan, BI dan Pemerintah melalui *dedicated team* Investor Relations Unit (IRU) terus mengkomunikasikan akan kinerja perekonomian nasional terkini kepada lembaga pemeringkat, investor dan kreditor asing dalam berbagai kesempatan.

Upaya ini diharapkan tidak hanya dalam menyikapi kondisi perekonomian dunia yang sedang lesu karena krisis Eropa pada saat ini. Namun juga dapat menjadi langkah dalam rangka penciptaan ‘ubi cilembu’ baru yang diperlukan oleh banyak negara lainnya. Seiring dengan proses industrialisasi maupun penguatan ketahanan pangan nasional yang akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Satu hal yang juga sangat penting adalah bagaimana memperbaiki defisit yang terjadi di sektor minyak dan gas. Langkah nyata harus diambil dan diaplikasikan segera.

Langkah-langkah ‘merah putih’ ini, pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan prospek perekonomian nasional. Bila itu terjadi, pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Memang diperlukan upaya serius demi tegaknya merah putih. Satu hal yang bisa diperbuat masyarakat dalam merealisasikan perekonomian nasional yang *sustainable* melalui penggunaan produk-produk nasional serta dibarengi dengan sikap konsumtif yang positif dari kalangan menengah atas.

Kesadaran akan pengelolaan perekonomian yang baik, bukan hanya ditujukan bagi kita semata. Kejayaan Negeri Nusantara perlu untuk dikembalikan lagi demi seluruh keturunan kita nantinya. Semuanya saat ini tergantung kita (BI, Pemerintah dan masyarakat luas) maukah berpartisipasi atau tidak. Nah, ketika kita satu langkah, akan semakin membuat analis lembaga pemeringkat dunia, investor dan kreditor semakin *kesemsem* dengan Indonesia. ●

# Best Practices Kegiatan Investor Relations



**Bimo Epyanto,**  
Analis Ekonomi  
Divisi Analisis Pinjaman Luar Negeri &  
Hubungan Investor  
Departemen Internasional

Untuk menjamin kesuksesan kegiatan investor relations (IR), Institute of International Finance (IIF) telah memberikan panduan mengenai elemen-elemen kunci yang harus dimiliki oleh sebuah unit kerja IR. Panduan ini menekankan pentingnya peranan komunikasi langsung secara formal antara otoritas di suatu negara dengan pelaku pasar. Dan komunikasi yang baik itu diartikan sebagai komunikasi dua arah: berbicara dan mendengar. Lalu, apa sajakah elemen-elemen penting itu?

## • Unit Formal IR

Unit ini merupakan poin kontak terdepan bagi otoritas dalam berkomunikasi dengan pelaku pasar atau investor. Unit ini memiliki fungsi yang bila dianalogikan berfungsi layanan satu atap bagi otoritas untuk menyediakan informasi dan data yang diperlukan oleh investor, dan bagi investor untuk menghubungi otoritas serta memberikan masukan atau tanggapan terhadap kebijakan-kebijakan. Sehingga secara institusi, unit ini bukanlah unit yang hanya bersifat “sambilan”. Di bawah otoritas mana unit kerja ini berada bukanlah hal yang utama (bisa di bawah bank sentral, Kementerian Keuangan, atau unit kerja yang independen). Di Indonesia, unit kerja IR ada di Bank Indonesia yang berfungsi sebagai koordinator unit IR yang ada di Kementerian Keuangan dan beberapa instansi lain. Sementara di Filipina, unit IR ada di bawah bank sentral. Lain lagi dengan Brazil yang memiliki IR baik di bank sentral dan kementerian keuangan dengan kedudukan yang relatif sejajar.

## • Website

Aktivitas hubungan investor harus didukung oleh *website* yang tidak saja

mumpuni tetapi juga *user-friendly*. Tentu saja *website* ini juga harus dikinikan secara berkala dan tepat waktu. Sebuah *website* merupakan komponen esensial yang mampu secara efisien dan efektif menyampaikan pesan atau informasi kepada investor sekaligus memperoleh saran, masukan, serta menjawab pertanyaan. *Website* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan survei misalnya dalam rangka *self-assessment*. Agar efektif, informasi yang ada di dalam *website* harus tertata dengan rapi, sederhana, dan *user-friendly*. *Website* IR idealnya memiliki komponen informasi mengenai data ekonomi dan kebijakan, materi presentasi atau *audio/video streaming* dari konferensi jarak jauh, tautan dua arah dengan beberapa *website* instansi terkait, fasilitas pendaftaran bagi investor untuk bergabung dalam daftar investor, dan informasi kontak staf IR.

## • Diseminasi Data Ekonomi Makro dan Kebijakan

Salah satu tanggung jawab utama unit kerja hubungan investor adalah mengkoordinir, mengumpulkan, dan mendiseminasikan data serta informasi yang relevan untuk pelaku pasar apakah itu melalui *website* atau email. Agar bisa efektif, beberapa prinsip harus diikuti yaitu:

- Diseminasi data makroekonomi dan informasi kebijakan secara tepat waktu dan berkala.
- Informasi yang spesifik dan interpretasi yang jelas sehingga menghindari pengguna dari asimetri informasi.
- Format data yang dapat di modifikasi akan lebih memberikan nilai tambah bagi pengguna (*user friendly*)

## • Data Penting Lainnya

Terdapat tiga jenis data lainnya yang memegang peranan kritikal dalam menghasilkan asemen terhadap perekonomian suatu negara, yaitu operasional pemerintah, utang pemerintah dan utang luar negeri.

## • Daftar Kontak Investor

Unit IR harus membangun *data base* profil investor, analis, lembaga pemeringkat dan pelaku pasar keuangan yang selalu mengikuti perkembangan perekonomian negaranya. *Data base* ini harus terus dikinikan sehingga

akan diperoleh gambaran profil para investor, dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap perilaku investornya, khususnya dalam menghadapi situasi tertentu yang mempengaruhi kondisi pasar keuangan.

## • Umpan Balik dan Jalur Komunikasi

Mekanisme umpan balik sangat penting dalam memperkuat komunikasi dua arah antara investor dan pembuat kebijakan. Jalur komunikasi ini harus disediakan secara formal dalam merespons kepentingan investor, menerima umpan-balik untuk kemudian menyampaikan informasi yang diperoleh kepada pembuat kebijakan. Dengan demikian kebijakan yang dihasilkan merupakan kebijakan yang telah mengakomodasi kepentingan pelaku pasar.

## • Respons Memadai Ditengah Ketidakpastian

Negara penerbit surat utang harus meningkatkan sensitivitas terhadap kemungkinan terkikisnya kepercayaan investor pada kondisi krisis, dan proaktif melakukan komunikasi dengan pelaku pasar. Sentimen negatif pasar dapat terjadi sebagai akibat kombinasi faktor domestik dan eksternal. Personil IR harus mampu memberi penjelasan yang komprehensif atas situasi yang terjadi, dan memberikan pemahaman dari suatu respons kebijakan. Apabila dipandang perlu, frekuensi komunikasi dengan investor dapat ditingkatkan dengan melibatkan otoritas pengambil keputusan. Dalam kondisi tersebut juga diperlukan media dialog yang tepat seperti melalui *investor update* di pusat pasar keuangan internasional dengan menghadirkan pejabat senior pembuat kebijakan.

## • Self-assessment Rutin

Unit IR harus melakukan penilaian rutin untuk memastikan mereka memberikan pelayanan terbaik bagi para pembuat kebijakan dan investor. Layanan ini harus dapat diukur berdasarkan faktor-faktor seperti ketepatan waktu, akurasi, dan penyebaran informasi ke semua kelompok investor yang ditargetkan. Unit IR juga harus mampu mengolah umpan balik secara efektif dan menggunakan teknologi yang paling optimal untuk menjangkau investor. Unit IR bisa melakukan evaluasi sendiri atau melibatkan pihak ketiga. ●

# Posisi Sovereign Rating Indonesia Saat Ini

Moody's	S&P	Fitch	Brief Definition
<i>Investment Grade - High Creditworthiness</i>			
Aaa	AAA	AAA	Git edge, prime, maximum safety
Aa1	AA+	AA+	Very high grade, high quality
Aa2	AA	AA	
Aa3	AA-	AA-	
A1	A+	A+	Uppermedium grade
A2	A	A	
A3	A-	A-	
Baa1	BBB+	BBB+	Lower medium grade
Baa2	BBB	BBB	
<b>Baa3</b>	<b>BBB-</b>	<b>BBB-</b>	
<i>Distinctly Speculative - Low Creditworthiness</i>			
Ba1	<b>BB+</b>	BB+	Lowgrade, speculative
Ba2	BB	BB	
Ba3	BB-	BB-	
B1	B+	B+	Highly speculative
B2	B	B	
B3	B-	B-	
<i>Predominantly Speculative - Substantial Risk or in Default</i>			
Caa	CCC+	CCC	Subatantial risk, in poor standing
	CCC-		
Ca	CC	CC	May be in default, extremely speculative
	R	C	
			Even more speculative than those above, Income bonds-no interest being paid
	SD	DDD	Default
	D	DD	
		D	

Sovereign credit rating kita sekarang ada di level ini nih...

**Current Rating :**  
 Fitch Ratings = BBB- (stable)  
 Standard & Poor's : BB+ (positive)  
 Moody's : Baa3 (stable)  
 R&I : BBB- (stable)  
 JCRA : BBB- (stable)



## Ketawa ala BI!

### Nonton Lagi

Seorang ayah mengajak anak lelakinya yang berusia 4 tahun menonton langsung sebuah pertandingan sepak bola. Itu adalah pertama kalinya si anak menonton bola.

Sampai di tempat, pertandingannya ditunda beberapa waktu. Jadi sembari menunggu pertandingan dimulai, mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol dan membeli apa pun yang ditawarkan oleh para pedagang: roti, minuman kaleng, permen, jagung berondong, es krim, kacang goreng, bakpao, kue cokelat, dan hot dog.

Setahun kemudian, si ayah bertanya kepada si anak, "Kamu mau nonton pertandingan sepakbola lagi?"

Si anak berpikir serius sekali dan akhirnya berkata, "Tidak mau, Pa. Adi masih kenyang kok!"

### Makanan Nggak Enak

"Aku nggak bisa makan makanan ini," teriak seorang pelanggan restoran yang marah. "Panggil manajernya!"

"Tidak ada gunanya," kata seorang pelayan, "ia juga tidak akan mau makan makanan itu."

### Lobster-Lobster

"Salah satu cakar lobster ini hilang," kata seorang pelanggan sambil bersungut-sungut.

"Lobster-lobster itu bertengkar di dapur dan kadang-kadang saling menggigit cakar masing-masing sampai lepas," jawab si pelayan.

"Kalau begitu, bawa yang ini kembali ke dapur dan berikan aku lobster yang menang!"

### Dua Pemburu

Dua orang pemburu sedang ada di hutan saat salah satunya jatuh ke jurang. Ia sepertinya tidak bernapas, matanya melotot.

Temannya mengambil telepon selulernya dan menelepon layanan darurat.

Dengan histeris, ia berkata kepada operatornya, "Temanku mati! Apa yang harus aku lakukan?"

Si operator, dengan suara yang halus, berkata, "Tenang. Saya bisa bantu. Pertama, pastikan bahwa dia sudah mati."

Suasananya hening, dan kemudian terdengar suara tembakan, "Dor ... dor ...." Lalu pria tadi berkata lagi, "Oke, terus apa yang lagi yang harus kulakukan?"

# Memperkuat BPR Melalui STKE

Nasabah bank perkreditan rakyat (BPR) di wilayah Jawa Timur bisa menikmati layanan sistem pembayaran yang cepat dan aman dengan biaya relatif murah melalui sistem transfer kredit elektronik (STKE) sejak 30 Oktober 2012. STKE dikembangkan oleh Bank Jatim sebagai bank pengayom BPR (APEX BPR) di wilayah Jawa Timur yang bekerjasama dengan Bank Indonesia. STKE merupakan sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan transfer dana antar anggota APEX BPR dan/atau dengan bank umum melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Sebagai infrastruktur system pembayaran, STKE banyak memberikan manfaat baik bagi BPR, nasabah BPR, maupun Bank

Jatim sebagai penyelenggara STKE tersebut. Bagi nasabah BPR, STKE dapat memberikan layanan transfer dana yang cepat, aman, dan efisien, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi. Bagi BPR,



STKE dapat meningkatkan loyalitas nasabah BPR dan meningkatkan daya saing BPR dengan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan *fee*

*based income* BPR. Sedangkan bagi Bank Jatim selaku penyelenggaraan STKE dapat meningkatkan perannya sebagai APEX BPR dan memperkuat Bank Jatim sebagai Regional Champion.

Bank Jatim mengembangkan STKE melihat adanya kebutuhan untuk melakukan kegiatan transfer dana baik oleh BPR maupun nasabahnya. Sebelum adanya STKE, untuk mengakomodir kegiatan transfer dana, BPR harus membuka rekening di beberapa bank umum. Dengan implementasi STKE, kegiatan transfer dana di BPR menjadi lebih efisien karena BPR tidak perlu lagi membuka rekening di beberapa bank umum untuk keperluan transfer dana tersebut, namun cukup pada satu Bank penyelenggara STKE. ●

## BI Bantu Penguatan Ketahanan Pangan di Minahasa Tenggara



Kepala KPw BI Prov.Sulut, Suhaedi saat penyerahan bantek kepada Bupati Mitra, Telly Tjanggalung disaksikan Gubernur Sulut Sinyo Hari Sarundajang

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

(Mitra), Perbankan, TNI, Bulog dan asuransi menyelenggarakan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 5 Oktober 2012. Kesepahaman ini adalah salah satu wujud implementasi program Penguatan Ketahanan Pangan komoditi Beras. “Pemda akan terus mengembangkan sistem penguatan pangan, baik dengan bantuan yang ada maupun penguatan kelembagaan,” ujarnya Bupati Mitra, Telly Tjanggalung.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang mengatakan penguatan ketahanan pangan di Ratahan, Kabupaten Mitra ini, mudah-mudahan satu antisipasi yang sangat positif untuk memperkuat pangan Sulut menghadapi ancaman kekurangan pangan yang terjadi

di dunia. “Memang tahun ini kita mencanangkan Program Penguatan Ketahanan Pangan Perberasan di Kabupaten Minahasa Tenggara,” ujar gubernur.

Pada acara MoU itu juga dilakukan kegiatan penandatanganan akad kredit kepada debitur/petani dan penyerahan bantuan teknis KPw BI Provinsi Sulut berupa traktor tangan guna pengembangan pertanian di Mitra serta sosialisasi produk perbankan. “Bantuan traktor tangan ini merupakan wujud kepedulian BI untuk turut serta membangun pertanian di Kabupaten Mitra, salah satu daerah potensial untuk tanaman padi,” ujar Kepala KPw BI Sulut Suhaedi. Bupati Mitra menyampaikan terimakasih ke BI yang telah memainkan peran besar terhadap penguatan pangan di Mitra. ●

# BI Survei Potensi Batu Mulia Martapura

Kota Martapura dikenal sebagai kota intan. Keberadaan julukan ini sudah menjadi kebanggaan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Banjar, juga masyarakat Kalsel keseluruhan. Kecamatan Martapura merupakan ibukota Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan. Wisatawan lokal dan asing kerap berkunjung ke pusat cinderamata dan transaksi penjualan serta penggosokan intan utama di Kalimantan ini. Potensi besar ini tentunya perlu dikembangkan. Oleh karena itu, KPw BI Wilayah Kalimantan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar bersama-sama melakukan survei ke pengrajin penggosokan intan di Desa Pesayangan pada 26 September 2012

“Dikarenakan batu mulia seperti intan dan permata merupakan ciri khas Martapura, semuanya ini tidak luput dari eksistensi dan keberadaan para penambang dan pengrajin yang secara turun temurun bergelut pada aktivitas tersebut,” ujar Triatmo Doriyanto

selaku Kepala Divisi Ekonomi Moneter KPw BI Wilayah Kalimantan di sela-sela kunjungan ke pengrajin penggosokan intan Martapura. Ia menambahkan, yang menjadi persoalan klasik, yakni pengrajin masih menggunakan pola dan peralatan yang sederhana. Saat ini, para pengrajin mulai dituntut menggunakan alat pengolahan yang moderen dan motif-motif serta polesan



yang lebih menarik. Apalagi bila mengingat kebutuhan selera pasar yang telah menuntut inovasi baru, baik pada motif maupun bentuk dan variasi khas dari setiap batu permata yang

ditampilkan oleh setiap pengrajin.

Abi Taswin selaku Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Kabupaten Banjar menjelaskan, bahwa Pemkab Banjar mendukung pengembangan industri batu mulia karena Kota Martapura dikenal dengan sebutan kota intan, sehingga produksi dan kualitasnya harus terus ditingkatkan. Salah satu hal yang bisa meningkatkan kualitas batu mulia dan permata adalah telah adanya Lembaga Pengembangan dan Sertifikasi Batu Mulia (LPSB) Banjar. “Diharapkan dengan keberadaan LPSB ini dapat membangkitkan kembali usaha batu mulia dan permata yang sebelumnya sempat terpuruk. Seiring dengan keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi penggosokan batu mulia, seni kerajinan dan penggosokan mengalami penyesuaian,” ujar dia.

Dalam kunjungan tersebut, tidak hanya melihat proses penggosokan batu mulia tetapi juga penggosokan batu permata dan proses pembuatan amban oleh pengrajin perak serta kunjungan ke LPSB. Melalui survei lapangan bersama para pengrajin tersebut dapat membantu para pengusaha kecil dan mikro untuk menambah hasil usaha dan nantinya akan meningkatkan daya beli dan perputaran perekonomian mikro bagi masyarakat di Kabupaten Banjar. ●

# Kerjasama Petani Bawang Indonesia & Thailand

“Petani bawang merah Thailand hanya memproduksi sekitar 100.000 ton/tahun yang setara dengan persepuluh hasil produksi bawang merah dari petani Indonesia dan hanya mengekspor sekitar 25% dari hasil panennya,” ujar Charckrit Duangphastra PhD, *Project Leader Research and Development Shallot Thailand* di Cirebon, 16 Oktober 2012. Pertemuan yang difasilitasi oleh KPw BI Cirebon tersebut bertujuan untuk menjajaki kerjasama bilateral Indonesia – Thailand mengenai perdagangan bawang merah. Hadir dalam pertemuan tersebut rombongan atase perdagangan Kedutaan Besar Thailand dan stakeholders bawang merah nasional di Cirebon.

Charckrit Duangphastra menjelaskan puncak produksi bawang merah di Thailand terjadi pada Bulan Desember – Februari saat musim dingin di Thailand,

sementara Indonesia mencapai produksi puncak pada periode akhir semester I. Dengan demikian, tentunya ada peluang kerjasama yang saling menguntungkan



antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut disambut baik pengusaha bawang merah nasional maupun asosiasi bawang

merah seperti Dewan Bawang Nasional (Debnas), Asosiasi Perbenihan Bawang Merah Indonesia (APBMI), Pengusaha/eksportir bawang merah, pengurus Koperasi Nusantara Jaya. Selain itu dihadiri pula petani bawang merah di Kabupaten Cirebon yang sebagian besar merupakan anggota Klaster Bawang Merah binaan KPw BI Cirebon.

Ketua Umum Debnas, Sunarto menegaskan bahwa kebijakan pembatasan pelabuhan bongkar muat produk hortikultura yang diterapkan Indonesia tidak bermaksud menutup membatasi/diri dari perdagangan internasional namun lebih pada pengaturan tata niaga komoditas untuk kepentingan nasional. Kebijakan penguatan perekonomian nasional diterapkan di berbagai Negara (termasuk Thailand) meskipun era perdagangan bebas telah dimulai. Pada kesempatan tersebut, para delegasi membicarakan rencana bisnis bilateral antarpengusaha. Setelah peninjauan kerjasama usai, dilanjutkan dengan melakukan kunjungan lapangan ke sentra pertanian bawang di Kab. Cirebon serta pergudangan bawang merah di Losari. ●

■ **KPw Solo:**

# Harmony By Contrast Antara Modern, Budaya Lokal & Kolonial

Jika suatu ketika Anda berkunjung ke kota Solo di Jawa Tengah, dan kebetulan melewati Jalan Ronggowarsito, sesaat perhatian akan tertuju pada dua gedung yang begitu kontras. Bangunan yang satu memberi kesan moderen dan yang satunya jadul (jaman dulu) peninggalan era kolonial. Gedung berlantai lima yang memberi kesan moderen itu adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo yang baru diresmikan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution pada 5 Oktober 2012. Kebetulan letak gedung itu bersebelahan dengan eks De Javasche Bank yang juga bekas kantor lama KPw Solo.

“BI selalu berusaha mencari jalan bagaimana tetap memelihara budaya lokal. Kehadiran gedung baru ini tidak hanya sebagai tempat untuk bekerja, tetapi lebih dari itu untuk memperkaya khasanah budaya,” ujar GBI Darmin Nasution. Sebagai gedung bank sentral yang terletak di kota yang kaya dengan budaya dan berbagai peninggalan bangunan-bangunan bersejarah, gedung baru KPwBI Solo dirancang dengan konsep “*harmony by contrast*”. Konsep ini perpaduan gaya arsitektur moderen dan gaya arsitektur berbudaya Jawa

dan kolonial yang diselaraskan dalam suatu harmoni yang indah, anggun dan mewakili



“Harmony by Contrast” antara gedung baru KPwBI Solo dan gedung lama KPwBI Solo yang merupakan peninggalan De Javasche Bank

perkembangan arsitektur dan budaya pada zamannya.

Gedung baru berlantai lima ini, secara fisik terlihat megah dan modern. Akan tetapi balutan desain interior gedung penuh dengan ornament seni budaya Jawa, seperti terlihat pada bagian lobi utama terpampang karya seni mural ornamen batik dengan motif *Sido Mukti*, *Sido Labur* dan *Sido Mulya*. Selain itu juga terdapat panel tembaga ketok Kalpataru, panel kayu jati ukir truntum dan madubranta

serta mural wayang beber pada batu candi yang terletak di dinding samping gedung. Selain itu, kata Direktur Eksekutif Departemen Logistik dan Pengamanan BI Pusat, Dyah Virgoana Gandhi, untuk pertama kalinya di Kota Solo, gedung baru BI telah menerapkan prinsip-prinsip *green building*, yang telah mendapatkan pengakuan desain dengan predikat Platinum dari Green Building Council Indonesia.

Masih menurut Dyah Virgoana Gandhi, prinsip *green building* tersebut sebagai upaya efisiensi energi dan ramah lingkungan. Pada area gedung KPwBI Solo tersedia ruang terbuka hijau yang maksimal dan ditanami tanaman khas lokal seperti sawo kecil, kepel, dan tanjung. Gedung yang didominasi elemen kaca *low-energy* memungkinkan penggunaan cahaya alami secara optimal untuk bekerja serta adanya fasilitas pengolahan air hujan dan air limbah layak pakai yang didaur ulang untuk keperluan menyiram tanaman dan flushing toilet. Sementara itu, gedung lama KPwBI Solo yang merupakan peninggalan De Javasche Bank akan dikonservasi dan akan digunakan untuk kepentingan publik. Hadir pada pereswian KPw Solo yakni Deputy Gubernur Bank Indonesia, Ardhayadi Mitroatmojo dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih, Wakil Walikota Solo FX. Hadi Rudyatmo dan anggota DPR RI komisi XI. ketika memberi sambutan.●

■ **KPw Purwokerto:**

# “Indonesia Butuh Ahli Keuangan Syariah”

“Adik-adik sekalian diharapkan mampu juga menjadi kader-kader penerus bangsa terutama sebagai ahli ekonomi Islam dalam hal ini syariah, karena saat ini sangat sulit memperoleh ahli di bidang syariah untuk mengawal pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” tutur Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Purwokerto saat memberi kuliah umum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, 17 Oktober 2012. Selain kuliah umum tentang kebanksentralan, kehadiran BI di STAIN juga dalam rangka pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara KPw Purwokerto dan STAIN.

Pemberian beasiswa ini merupakan bagian dari Program Sosial Bank Indonesia yang juga telah dilakukan bagi mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi negeri lainnya di dalam negeri. Kepala STAIN Dr A. Luthfi Hamidi,

M.Ag mengatakan, “Selaku perwakilan dari STAIN, saya merasa terhormat karena Kantor



Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto telah bersedia menggandeng STAIN untuk bekerjasama bahkan memberikan beasiswa

bagi mahasiswamahasiswa STAIN. Selanjutnya saya berharap Bank Indonesia akan dapat memberikan pencerahan mengenai ekonomi Islam terutama penerapannya di dunia perbankan bagi para mahasiswa STAIN.”

Dudi Herawadi meminta agar fasilitasi ini mampu meningkatkan prestasi mahasiswa terutama dalam menyongsong pasar dunia kerja. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, untuk itu edukasi kebanksentralan termasuk perbankan masih diharapkan akan terus ditingkatkan salah satunya melalui kuliah umum seperti yang dilakukan saat ini. Dalam kuliah umum kepada mahasiswa STAIN, ia banyak mengulas mengenai BI secara umum, mulai dari asal terbentuknya BI yang pada awal mulanya adalah De Javasche Bank sampai dengan tujuan, tugas pokok serta kedudukan BI saat ini di RI.●

## ■ SESPIBI Angkatan 30 :

# Being A Leader Is A Process Of Becoming

“Belajar mengenai kepemimpinan sebagaimana yang saudara telah alami selama tiga bulan sebenarnya justru awal dari segalanya. Mulai saat ini saudara dituntut untuk dapat berperan optimal agar kinerja dan reputasi lembaga meningkat.” Kata-kata ini menjadi amanat Gubernur BI, Darmin Nasution, bagi para peserta program Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan 30 pada acara penutupan program yang digelar di Ruang Serbaguna Ged. Thamrin BI Jakarta (17/10).

Di hadapan 36 orang peserta, Darmin menegaskan bahwa mempelajari kepemimpinan sebenarnya justru awal dari segalanya. “Kepemimpinan yang sebenarnya akan lahir dan dimatangkan dari berbagai kiprah riil saudara dalam melaksanakan tugas yang saudara emban baik sebagai pejabat Bank Indonesia, maupun sebagai anak bangsa,” demikian Darmin menambahkan. Selama tiga bulan, para peserta SESPIBI “dicekoki” dengan pengajaran dan *sharing* dari puluhan narasumber yang luar biasa. Tak main-main, pengajarnya adalah para pemimpin yang telah teruji kiprahnya.

Diantaranya para pengajar, ada Prof. Dr. Boediono, Prof. BJ. Habibie, dan Jusuf Kalla. Dari kalangan para menteri ada Armida Alishjahbana, Dahlan Iskan, Purnomo Yusgiantoro. Begitu pula para mantan menteri seperti Daoed Joesoef, Hassan Wirayuda, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, Tanri Abeng, Dr. Emil Salim. Tiga orang mantan Gubernur BI pun hadir membagikan pengajaran dan pengalamannya, yaitu Adrianus Mooy, Arifin M. Siregar, dan Burhanuddin Abdullah.

Tak hanya dari dalam negeri, hadir pula pengajar dari negara lain yaitu Andrew Sheng

(Chief Advisor China Banking Regulatory Commission), Juan De Zuniga, Jr (Deputi Gubernur Banko Sentral Ng Pilipinas), dan Dr. Tarisa Watanagese (mantan Gubernur Bank of Thailand). Masih berjejer nama-nama lainnya dari Pemimpin Satker BI, parlemen, pengamat, dan praktisi. Dari jejeran nama pengajar ini, tentunya kita yakin bahwa lulusan SESPIBI pun telah mendapat bekal yang luar biasa untuk menjalankan amanat sebagai pemimpin BI nantinya. Kini, lembaga telah meminta para peserta SESPIBI Angkatan 30 ini untuk menjadi pemimpin yang menyelesaikan berbagai persoalan BI, dan bukan justru menjadi bagian dari persoalan.

“Anda diminta menjadi pemimpin yang

agar para pemimpin BI kini menyisihkan waktu satu hari dalam satu semester melepaskan diri dari pekerjaan rutinnnya khusus untuk mengevaluasi bawahannya. Dengan langkah ini diharapkan pimpinan memiliki jejak rekam kinerja bawahannya, yang tentunya menjadi dasar yang baik bagi penguatan manajemen SDM BI.

Beragam respons peserta SESPIBI. Kepala Divisi Pengawasan Bank 1-1 Departemen Pengawasan Bank 1 BI, Sempa Arih H. Sitepu yang mengatakan, “kita enggak boleh nyaman dengan cara yang lama, harus meningkatkan wawasan. Kita harus banyak mempelajari, mengamati, dan berdiskusi sebelum membuat kebijakan-kebijakan.” Sementara, Kepala Divisi Perundang-Undangan Dan Pengkajian Hukum Departemen Hukum Bank Indonesia Sukarelawati Permana berujar, “seorang pemimpin dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik. BI tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan kita terkait dengan cara berkoordinasi dengan pihak lain, tidak hanya dengan BI sendiri tetapi juga pihak luar.” Senada dengan itu, Kepala Divisi Pengawasan Perbankan Syariah Ahmad Soekro



Peserta SESPIBI Angkatan 30 bersama dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

mau menyingsingkan lengan baju, turut memutar otak dan terjun ke lapangan, bukan seperti priyayi-priyayi yang nyaman duduk di meja dinas. Sekali lagi, kepemimpinan anda yang sesungguhnya akan diuji dan dipelajari di lapangan, secara terus menerus anda diharuskan menjawab bagaimana menyikapi berbagai kompleksitas permasalahan yang dihadapi,” tandas Darmin. Selain itu, para pemimpin ini pun diharapkan membantu menciptakan sistem yang lebih baik untuk pembentukan para pemimpin BI ke depan. Ia juga meminta

Tratmono menilai peserta dibekali pemahaman berbagai isu nasional, regional, dan dunia. Gunanya memberikan sudut pandang yang luas kala menjadi seorang pemimpin kelak.

Dari 36 peserta SESPIBI, ada 5 (lima) peserta yang mendapatkan penilaian tertinggi yakni Dicky Kartikoyono, Endy Dwi Tjahjono, Rosalia Suci, Edi Susianto, dan Imansyah. Selamat menerima amanat baru, meningkatkan peran optimal demi peningkatan kinerja dan reputasi lembaga. *Being a leader is a process of becoming.* ●



Akses IRU di  
[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

